

Book Similarity Check Identitas dan Budaya

by Satya Limanta

Submission date: 02-Aug-2024 10:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2426104665

File name: Book_Chapter_-_Identitas_dan_Budaya_-_pakai.pdf (1.95M)

Word count: 20250

Character count: 128601

**Identitas dan Budaya
dalam Masyarakat
Berjejaring**

1

Ketentuan Pidana

Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Identitas **dan** Budaya dalam Masyarakat Berjejaring

Editor:

Setefanus Suprajitno

Ratna Noviani



PENERBIT PT KANISIUS

Identitas dan Budaya dalam Masyarakat Berjejaring

1024003-xx

© 2024-PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jln. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke-3 2 1

Tahun 26 25 24

Editor : Setefanus Suprajitno & Ratna Noviani

Editor penerbit : Uji Prastya

Desain isi : Nico Dampitara

Desain sampul : Early Eunike Devania

ISBN 978-979-21-69xxx

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	v
Identitas dan Budaya dalam Masyarakat Berjejaring: Satu Pengantar Setefanus Suprajitno & Ratna Noviani	vii
Daftar Isi.....	xxxviii

BAGIAN I

TRANSMEDIA DAN DIGITAL STORYTELLING

1. <i>Transmedia Storytelling: Konvergensi, Partisipasi, dan Ekonomi Afektif</i> Florens Debora Patricia & Faruk H.T.	2
2. <i>11 Questions: Transmedia Storytelling Pertunjukan Teater</i> Meilinda & Stefanny Irawan	31
3. <i>Social Storytelling Selebritas Mikro Penggemar K-Pop di Instagram</i> Kusnul Fitria & Wiwik Sushartami	57
4. Platformisasi dan Komodifikasi Komik sebagai Kendaraan Bercerita Adhany Juniasyarah Emha & Salsabila Azzahra	90
5. Progresivitas dalam Bingkai Konservatisme: Menelisik Ekspresi Perempuan Salafi di Media Sosial Instagram Wahdah Kamelia Salsabila & Laillia Dhiah Indriani	120

BAGIAN II

PENJENAMAAN DIRI DAN BUDAYA LAYAR

6. Penjenamaan Diri dan Relasi Kuasa dalam Kasus *Flexing* Pejabat Indonesia
Carina Fernanditha dan Liem Satya Limanta 160
7. Melihat Lebih Dekat: Penjenamaan Diri Kaum Muda Urban di Kedai Kopi di Yogyakarta
Adelia Septiani Restanti Tania & Shafira Karima Ardanareswari 185
8. Trajektori Diri dan Tatapan Turis Pekerja Muda Urban dalam Aktivitas *Workcation*
Fa'ida Nur Rachmawati 213
9. Praktik *Counter-Stereotype* Perempuan Bercadar di Instagram
Awanis Akalili 235
10. Transformasi Maskulinitas Diri: Melacak Relasi Gender dalam Album Foto Keluarga
Aly Mecca 269
11. Menjadi Selebritas Mikro dalam Pusaran Komodifikasi Diri: Sebuah Autoetnografi Kritis
Asmi Nur Aisyah 297

BAGIAN III

MINORITAS, BEBAN REPRESENTASI,
DAN POLITIK SOLIDARITAS

12. Di Balik Lensa Kamera: Representasi Kelompok *Queer* dalam Serial *Boys Love Thailand, KinnPorsche the Series* (2022)
Abdul Haris Nusa Bela & Dian Arymami 328



Penjenamaan Diri dan Relasi Kuasa dalam Kasus *Flexing* Pejabat Indonesia

Carina Fernanditha
Liem Satya Limanta

Pendahuluan

Bukan hal baru lagi bahwa manusia sebagai makhluk sosial sangat menggemari media sosial. Sebuah statistik yang diterbitkan oleh Statista menunjukkan bahwa lamanya waktu yang dihabiskan orang untuk bersosialisasi via internet terus meningkat sejak 2012. Pada 2022, ditemukan fakta bahwa rata-rata orang menghabiskan 147 menit setiap harinya untuk menggunakan media sosial (Statista, 2022). Dengan banyaknya hiburan dan kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, dapat diperkirakan bahwa angka ini akan terus meningkat pada masa mendatang.

Orang menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan. Ada yang menggunakannya untuk komunikasi jarak jauh, untuk mendapat informasi atau hiburan, serta untuk saling *sharing* seputar minat atau opini terkait subjek tertentu. Dengan tren meningkatnya penggunaan media sosial, identitas yang ditampilkan seseorang dalam dunia maya menjadi sama penting-

nya dengan identitas dalam dunia nyata (Dupont, 2020). Didukung dengan adanya unsur anonimitas dan kebebasan dalam dunia virtual, orang menjadi makin leluasa untuk menampilkan diri sesuka hati mereka (Valkenburg & Peter, 2011, dikutip dalam Wood, Bukowski, & Lis, 2016).

Ketika memilih identitas terbaik untuk ditampilkan, pada prinsipnya, seseorang sesungguhnya tengah mempraktikkan penjenamaan diri (*self-branding*). Secara singkat, istilah penjenamaan diri merujuk kepada bagaimana kita ingin dikenal (Nugroho, 2022). Penjenamaan diri adalah cara menampilkan bagian esensial dari diri seseorang, yang disebut sebagai citra diri atau jenama diri, yang nantinya dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandang orang tersebut. Sering kali, citra diri seseorang diciptakan berdasarkan reputasi, visi, talenta, penampilan, serta ekspektasi orang lain terhadap bagaimana seorang individu bersikap dalam situasi tertentu (Purkiss & Royston-Lee, 2012).

Dalam praktik penjenamaan diri, seseorang bebas menghilangkan maupun memperbaiki aspek tertentu dari diri mereka demi menampilkan citra yang terbaik (Purkiss & Royston-Lee, 2012). Namun, kebebasan berkreasi ini mungkin membuat orang terjerumus ke dalam tren *flexing*. Dalam konteks media sosial dan penjenamaan diri, *flexing* adalah tindakan pamer berlebihan, biasanya dalam hal kekayaan, barang-barang mewah, dan gaya hidup hedonis, dengan tujuan meningkatkan status sosial di masyarakat (Pakpahan & Yoegiantoro, 2023: hlm. 174). *Flexing* dapat dilakukan oleh pengguna media sosial dari berbagai kelas, gender, dan status sosial; mulai dari pekerja kantoran, pelajar, hingga pejabat pemerintahan. Namun, saat dilakukan oleh pejabat pemerintah, terkadang aksi pamer berlebihan dapat mendatangkan efek negatif.

Mulai Februari hingga April 2023, media massa Indonesia dipenuhi dengan berita seputar pejabat pemerintahan yang

mempraktikkan *flexing*. Kasus pertama yang secara tidak sengaja memulai rangkaian liputan ini adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Rafael mendapat perhatian publik setelah anaknya, Mario Dandy, ditahan atas penganiayaan brutal terhadap David Ozora, anak seorang pengurus GP Ansor, hingga mengalami koma (Prabawanti, 2023). Situasi berangsur memburuk ketika Mario dan istri Rafael, Ernie Meike, ketahuan memamerkan harta melimpah di profil Instagram mereka. Tidak lama kemudian, Rafael dicopot dari jabatannya dan berakhir sebagai tahanan KPK karena terbukti menerima uang suap serta melakukan tindak pencucian uang (Sinaga, 2023).

Setelah kasus penyalahgunaan kuasa serta hobi *flexing* keluarga Rafael menjadi viral, warga Indonesia mulai lebih memperhatikan konten media sosial para pejabat negara. Dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, bukan hal yang sulit bagi warganet Indonesia untuk menemukan pejabat Indonesia dan anggota keluarga mereka yang mempraktikkan *flexing*. Ditambah lagi dengan terbukanya informasi seputar kisaran gaji pejabat di internet, warganet dapat menyimpulkan bahwa gaya hidup yang dipamerkan di Instagram para pejabat tersebut tidak cocok dengan gaji yang seharusnya mereka peroleh (Maulana & Kurniati, 2023). Hasilnya, beberapa pejabat menjadi viral dan mendapat sorotan negatif.

Yang pertama adalah Esha Rahmansah Abrar, seorang pejabat Kemensetneg, yang dibebas-tugaskan setelah istrinya, Olivia, memamerkan hadiah berupa mobil baru dan emas batangan dari Esha (Saptohutomo, 2023). Yang kedua adalah S.F. Hariyanto, Sekretaris Daerah Riau yang melakukan klarifikasi ke LHKPN (Ni'am & Santosa, 2023) dan akhirnya dibebas-tugaskan setelah istri memamerkan barang-barang bermerek dan mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk anak-

nya di sebuah hotel berkelas (CNN Indonesia, 2023b). Yang berikutnya adalah Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang dipecat setelah istrinya, Vidya Piscarista, memamerkan barang mewah serta liburan ke luar negeri di akun Instagramnya (Dirgantara & Meiliana, 2023).

Persoalan yang menjadikan fenomena pemecatan ini menarik adalah bagaimana sebuah relasi kuasa dapat muncul dari upaya penjenamaan diri, yang pada esensinya bukan sesuatu yang negatif. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pejabat pemerintahan dapat dianggap sebagai anggota kelas atas. Karenanya, bukanlah hal yang aneh jika para abdi negara ini memiliki lebih banyak harta untuk dipamerkan, serta berusaha membangun citra diri yang bisa merefleksikan kelas sosial dan kuasa mereka. Akan tetapi, dalam kasus-kasus pemecatan tersebut, saat praktik *flexing* dihubungkan dengan situasi dan wacana terkini, tindak penjenamaan diri ini akhirnya dipandang sebagai suatu hal yang negatif hingga memicu masyarakat kelas menengah untuk mengartikulasikan kuasa mereka melalui media sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penjenamaan diri dan hubungannya dengan artikulasi kuasa yang terjadi antara pejabat pemerintah dan warganet Indonesia dalam kasus-kasus *flexing* di atas. Terkait batasan penelitian, tulisan ini hanya akan berfokus pada kasus *flexing* yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, Esha Rahmansah Abrar, S.F. Hariyanto, dan Sudarman Harjasaputra. Tulisan ini akan membahas alasan di balik citra mewah yang ditampilkan oleh para pejabat ini melalui kaca mata identitas sosial, serta bagaimana bagaimana warganet memaknai citra diri para pejabat lalu mengartikulasikan resistensi mereka, yang akan dikaji dengan menggunakan model *encoding-decoding* dari Stuart Hall (2019) serta teori relasi kuasa dari Michel Foucault (dikutip dalam May, 2014). Dengan menganalisis kasus-kasus ini, penulis berharap

dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kuasa dapat menjelma ke dalam praktik penjenamaan diri yang makin populer di masyarakat saat ini.

Flexing, Penjenamaan Diri, dan Identitas Sosial

Teori identitas sosial dalam esensinya memiliki tiga konsep dasar. *Pertama*, identitas sosial didefinisikan melalui hubungan sosial, dengan membandingkan kesamaan serta perbedaan diri sendiri dan orang lain. *Kedua*, identitas sosial adalah identitas yang dimiliki bersama oleh sesama anggota kelompok sosial, serta menjadi dasar dalam tindakan dan perilaku kelompok tersebut. *Ketiga*, makna yang diasosiasikan dengan identitas sosial tertentu adalah produk dari sejarah dan kehidupan kolektif (Wetherel & Mohanty, 2010: hlm. 45). Dari ketiga prinsip dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia mendefinisikan diri berdasarkan kelompok sosial mereka dan bersikap sesuai ekspektasi masyarakat terhadap kelompok tersebut (Tajfel, 1978, dikutip dalam Wetherel & Mohanty, 2010: hlm. 48).

Identitas dapat berubah-ubah, terpengaruh oleh interaksi dalam kelompok sosial serta hubungan dan persepsi satu kelompok terhadap kelompok sosial lainnya. Dalam dinamika antarkelompok sosial, anggota kelompok sering kali terpengaruh oleh *in-group favoritism* atau bias kelompok, yaitu kecenderungan untuk menilai kelompoknya sendiri secara lebih baik dibandingkan dengan kelompok luar. Hal ini akhirnya membentuk persepsi negatif, stereotipe, serta prasangka buruk yang memicu sikap negatif terhadap kelompok luar yang dinilai membawa ancaman (Wetherell & Mohanty, 2010: hlm. 46–48). Oleh karena itu, demi membangun identitas sosial yang positif, orang dapat melakukan *social mobility*, yaitu praktik berpindah kelompok dan bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang mereka anggap lebih bermanfaat bagi mereka

(Tajfel & Turner, 1979, dikutip dalam Wetherell & Mohanty, 2010: hlm. 50).

Namun demikian, untuk dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam kelompok pilihan mereka, seseorang harus mengadopsi kepercayaan, nilai, dan norma kelompok tersebut (Wetherell & Mohanty, 2010: hlm. 54-56). Hal ini dapat mengarah pada *identity salience*, yaitu kondisi ketika status keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial menjadi begitu penting hingga memengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi individu yang ingin mempertahankan keanggotaannya. Orang yang terpengaruh *identity salience* akan menegosiasikan artikulasi identitasnya agar selalu sesuai dengan kelompoknya—serta berharap akan mendapat pengakuan positif dari sesama anggota kelompok—sebagai bukti bahwa mereka memang berhak diterima dalam kelompok tersebut. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemauan menyelaraskan diri dan membuktikan adanya kesamaan dengan anggota dalam kelompok, sekaligus mendiferensiasikan diri dari anggota luar kelompok (Haslam et al., 1998, dikutip dalam Wetherell & Mohanty, 2010: hlm. 52-53).

Dalam realitas kehidupan saat ini, konsep identitas sosial, dinamika kelompok, dan negosiasi identitas juga telah bermigrasi ke ruang digital seiring dengan makin terintegrasinya media sosial dalam pergaulan sehari-hari. Waktu interaksi kelompok pun makin panjang, hingga akhirnya muncul tekanan ekstra bagi para anggota untuk menjaga kontinuitas serta terus menegosiasikan identitas digital mereka agar selalu sesuai dengan nilai dan ideologi kelompok (Dupont, 2020). Untuk tetap terintegrasi ke dalam kelompok sosialnya, individu harus senantiasa mengatur hal-hal yang ia unggah untuk mendapatkan pengakuan dari sesama anggota kelompok. Berdasarkan jumlah *like* dan komentar positif yang ditinggalkan oleh sesama anggota, seseorang dapat mengukur

seberapa diterima mereka dalam kelompoknya (Valkenburg & Peter, 2011, dikutip dalam Wood, Bukowski, & Lis, 2016).

Namun, dengan sifat media sosial yang terbuka, selain sesama anggota kelompok, hampir semua orang yang memiliki akses ke internet dapat melihat apa pun yang diunggah seseorang di akun media sosialnya. Pada titik tertentu, seseorang mungkin juga merasakan tekanan tidak langsung untuk mendapatkan *like* dan komentar positif tidak hanya dari sesama anggota kelompok, tetapi juga dari warganet pada umumnya. Dengan munculnya keinginan untuk menarik khalayak yang lebih luas, kebanyakan orang akhirnya berusaha menampilkan diri mereka sehebat mungkin, bukannya senyata mungkin (Valkenburg & Peter, 2011, dikutip dalam Wood, Bukowski, & Lis, 2016). Hal ini menjurus kepada *flexing* sebagai cara yang paling umum untuk membuat orang lain terkesan dan meningkatkan status sosial seseorang.

Berkaca pada kasus-kasus *flexing* di atas, dapat dilihat bagaimana para pejabat ini mendefinisikan identitas mereka dengan cara membandingkan diri mereka dengan orang lain, sejalan dengan konsep identitas sosial (Tajfel, 1978, dikutip dalam Wetherell & Mohanty, 2010). Untuk membangun identitas sosial yang positif, mereka kemudian mencoba bergabung dengan kelas atas yang mereka anggap lebih bergengsi dan menguntungkan bagi mereka. Agar bisa terintegrasi sepenuhnya ke dalam kelompok sosial tersebut, para pejabat ini berusaha membuktikan kesesuaian dan kesamaan mereka dengan masyarakat kelas atas sekaligus membedakan diri mereka dari masyarakat kelas menengah dan bawah. Hal ini dilakukan dengan membangun citra diri yang glamor, dengan cara mengadopsi gaya hidup mewah.

Tindakan para pejabat ini sesuai dengan konsep *identity salience*, di mana keinginan untuk dipandang dan diasosiasikan sebagai kalangan atas telah memengaruhi perilaku para pega-

wai negeri ini, dalam bentuk konsumsi barang-barang mewah, gaya hidup mewah, dan penjenamaan diri yang serba-glamor. Namun, mengingat bahwa interaksi sosial sudah merambah ke dunia daring (Valkenburg & Peter, 2011, dikutip dalam Wood, Bukowski, & Lis, 2016), maka gaya hidup mewah ini tidak hanya ditunjukkan di dunia nyata, tetapi harus dipamerkan juga di media sosial. *Flexing* yang dipraktikkan para pejabat ini berfungsi sebagai perpanjangan dari penjenamaan diri dan negosiasi identitas yang terjadi dalam kehidupan mereka di dunia nyata. *Like* dan komentar yang mereka terima di media sosial kemudian memudahkan para pejabat ini untuk mengukur dan menegosiasikan citra diri mereka agar selalu tampak positif serta selaras dengan identitas kelas atas (Kenshanahan et al., 2023).

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa penjenamaan diri dan *flexing* yang dilakukan oleh para pejabat dilatarbelakangi oleh keinginan mereka untuk mengeklaim posisi mereka di golongan kelas atas, untuk membedakan diri mereka dari golongan kelas menengah, sekaligus memanjat ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki sosial. Mereka melakukan hal ini karena status keanggotaan kelas atas membawa implikasi keuntungan dan prestise bagi mereka (Saputra et al., 2023). Karena para pejabat ini memandang keanggotaan kelompok sebagai sesuatu yang penting bagi identitas mereka, pikiran, perilaku, dan emosi mereka dipengaruhi oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, mereka bersedia melakukan apa saja untuk menyesuaikan artikulasi identitas mereka dengan keyakinan, nilai, dan ideologi kelompok. Ketika golongan kelas atas memamerkan gaya hidup mewah dan citra diri yang glamor, makin banyak pejabat yang mengikuti tren ini karena takut ketinggalan atau takut tidak dipandang sebagai anggota kelas atas (Kenshanahan et al., 2023).

Penjenamaan Diri, Artikulasi Kuasa, dan Resistensi

Dalam penjenamaan diri para pejabat, alasan mengapa golongan kelas atas dipandang sebagai identitas yang menguntungkan adalah karena kuasa yang mereka miliki. Kuasa di sini mengacu pada kemampuan seseorang, atau beberapa orang, untuk memengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi sang pemegang kuasa (Lukes, 1974, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 41). Dalam praktiknya, kuasa tidak hanya terwujud melalui kekerasan dan penindasan, tetapi juga dalam kata-kata, gagasan, dan cerita yang meresap jauh ke dalam budaya serta praktik sehari-hari, sehingga dapat memanipulasi orang yang mempraktikkannya (Oswell, 2006: hlm. 42; May, 2006: hlm. 21, 92). Foucault merumuskan lima tesis tentang kuasa, yaitu: kuasa bukanlah kepemilikan; kuasa tidak berada di luar relasi lain; kuasa berasal dari bawah; relasi kuasa bersifat “intensional dan non-subjektif”; dan resistensi akan selalu ada dalam relasi kuasa (May, 2006: hlm. 83).

Melalui lima konsep ini, Foucault menjelaskan bahwa sesungguhnya kuasa bukanlah kepemilikan seseorang atau suatu kelompok saja, melainkan dapat diartikulasikan oleh siapa saja, bahkan mampu beroperasi tanpa dikendalikan siapa pun (May, 2006: hlm. 83). Kuasa telah terjalin dalam relasi sosial, dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan aktivitas sosial kita sehari-hari (May, 2006: hlm. 83). Kuasa tidak datang secara eksklusif dari para penguasa, tetapi tersebar di setiap lapisan masyarakat dalam berbagai praktik sosial yang memengaruhi subjeknya (May, 2006: hlm. 84). Orang bisa mengartikulasikan kuasanya untuk memenuhi suatu tujuan, tetapi relasi kuasa sering kali memiliki orientasi tertentu dan menjurus pada suatu hasil yang mungkin berada di luar kendali subjeknya (May, 2006: hlm. 84). Terakhir, Foucault juga berpendapat bahwa di mana ada relasi kuasa, sering kali akan ada resistensi yang menyertai, meski

terkadang orang yang melakukan resistensi tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka tolak (May, 2006: hlm. 85).

Meski demikian, kuasa pada dasarnya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga dapat bersifat produktif karena sifatnya yang dapat memicu penciptaan pengetahuan dan wacana (May, 2006: hlm. 138). Dalam relasi kuasa, Foucault percaya bahwa pengetahuan bukanlah cerminan dunia yang universal dan objektif, melainkan sesuatu yang telah terjalin dengan kuasa dan praktik sosial, terbentuk oleh konteks sejarah, budaya, dan sosial dalam situasi spesifik. Produksi dan distribusi pengetahuan dapat dipengaruhi serta dikendalikan, yang nantinya berdampak pada konstruksi dan perubahan realitas. Karenanya, kuasa dapat beroperasi melalui pengetahuan karena pengetahuan memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah (May, 2006: hlm. 21, 92). Berhubung setiap orang dapat mengartikulasikan kuasa, maka sesungguhnya setiap orang memiliki kesempatan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah (May, 2006: hlm. 21).

Lebih lanjut, wacana dipahami sebagai segala bentuk ekspresi verbal dan non-verbal yang membawa makna, memengaruhi, dan dipengaruhi oleh situasi atau latar sosial di mana komunikasi tersebut sedang berlangsung (Jaworski & Coupland 2006, dikutip dalam Paltridge, 2012: hlm. 13). Karena wacana itu sendiri selalu berubah, serta memengaruhi dan dipengaruhi oleh subjeknya, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang dapat memengaruhi wacana sesungguhnya dapat mengartikulasikan kuasa. Setiap orang yang mencoba untuk mengubah atau mengendalikan wacana tertentu sesungguhnya sedang mengartikulasikan kuasanya karena kuasa, pengetahuan, dan wacana saling terkait dan selalu memengaruhi satu sama lain (Laclau & Mouffe, 1985, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 56-57). Dalam konsep ini dapat dikatakan bahwa setiap

orang dapat mempraktikkan kuasa untuk mengubah pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah dengan cara memengaruhi wacana seputar pengetahuan tersebut (May, 2006: hlm. 92).

Dalam produksi dan distribusi wacana serta pengetahuan untuk mengartikulasikan kuasa, media memiliki peranan besar. Hal ini karena media sebagai sebuah *Ideological State Apparatus* (ISA), sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mengontrol audiensnya dengan menempatkan dan menugaskan peran sosial tertentu pada tiap individu menurut ideologi yang dominan (Althusser, 1971, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 49-51). Berangkat dari pengertian ini, Stuart Hall mengembangkan model *encoding-decoding* untuk lebih memahami bagaimana makna dan wacana diproduksi, didistribusikan melalui media, dan dipahami serta disebarluaskan oleh penontonnya (Hall, 2019: hlm. 257-258). Ada tiga aspek yang terlibat dalam model *encoding-decoding* Hall, yaitu *encoder*/produser, pesan/makna, dan *decoder*/penerima pesan (Hall, 2019: hlm. 260).

Encoder/produser adalah mereka yang mengambil makna dari berbagai keyakinan, ideologi, dan nilai-nilai dalam praktik sosial, lalu memilah mana yang ingin mereka kodekan dan sebarluaskan dalam bentuk sebuah program media. *Encoder* memiliki kuasa untuk mengendalikan teknologi dan keputusan terkait ideologi apa yang ingin mereka sebarluaskan ke banyak orang. *Decoder*/audiens adalah mereka yang menerima pesan dari *encoder*, dengan melakukan *decoding* terhadap program media yang disajikan kepada mereka. *Decoder* tidak memiliki kendali atas ideologi apa yang diberikan kepada mereka dalam program media, tetapi mereka memiliki kuasa dalam artian bahwa mereka sebagai penonton adalah sumber sekaligus penerima pesan. (Hall, 2019: hlm. 259-260).

Hall menguraikan lebih lanjut bahwa audiens mempunyai pilihan untuk menerima dan mereproduksi pesan yang disam-

paikan kepada mereka atau tidak. Karena *encoder* mengambil makna dari praktik sosial yang pada dasarnya terbentuk berdasarkan ideologi, keyakinan, dan nilai yang direproduksi oleh *decoder* (Hall, 2019: hlm. 259-260), penonton sebagai *decoder* sesungguhnya memiliki kuasa atas *encoder*. Kuasa ini terletak pada pilihan yang dimiliki *decoder* dalam memaknai suatu program. Ada tiga jenis bacaan berbeda yang dapat diambil oleh *decoder*: bacaan dominan, bacaan negosiasi, dan bacaan oposisional (Hall, 2019: hlm. 272-274).

Bacaan dominan berarti penonton melakukan proses *decoding* terhadap sebuah pesan dan memahaminya sesuai tujuan produser. Dalam pembacaan ini, *decoder* menerima pesan tersebut sepenuhnya dan mereproduksi maknanya sesuai yang dimaksud *encoder*. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kesamaan antara nilai-nilai ideologis dan kepercayaan yang dianut oleh penonton dan produser. Oleh karena itu, audiens kemudian melanjutkan distribusi dan integrasi ideologi tersebut ke dalam praktik sosial mereka (Hall, 2019: hlm. 272).

Bacaan negosiatif berarti bahwa penonton melakukan *decoding* sesuai dengan maksud produser, tetapi juga menegosiasikan interpretasi mereka sendiri berdasarkan situasi mereka. Dalam pembacaan ini, *decoder* menerima sebagian makna yang dimaksudkan oleh *encoder*, tetapi sekaligus juga menolak bagian lainnya. Artinya, penerima pesan mengakui adanya kebenaran dalam bagian pesan yang dikirimkan produser kepada mereka, tetapi menolak sebagian lainnya karena keyakinan atau ideologi yang bertentangan. Dalam hal ini, audiens memiliki pilihan untuk memilah nilai-nilai yang ingin mereka terima dan sebarkan, dan nilai-nilai yang tidak mereka terima. Oleh karena itu, beberapa makna dan nilai terintegrasi ke dalam praktik sosial mereka, sedangkan yang lain tidak (Hall, 2019: hlm. 273).

Bacaan oposisional berarti bahwa penonton melakukan *decoding* pesan dengan cara yang sangat berbeda dari maksud produser sehingga menghasilkan interpretasi yang sangat berbeda. Dalam pembacaan ini, *decoder* sepenuhnya menolak makna yang dimaksudkan oleh *encoder*. Hal ini biasanya terjadi ketika pesan yang dikirim produser sepenuhnya bertentangan dengan keyakinan dan ideologi yang dimiliki penonton. Dalam hal ini, audiens menolak keseluruhan makna yang disampaikan kepada mereka, atau bahkan menentang ideologi yang disisipkan dalam program media dengan keyakinan ideologis mereka sendiri. Oleh karena itu, makna dan nilai yang dikirimkan oleh *encoder* tidak terintegrasi ke dalam praktik sosial para *decoder*, dan reproduksi ideologi berhenti pada mereka (Hall, 2019: hlm. 274).

Berdasarkan pemahaman bahwa audiens bukanlah konsumen pasif dalam menikmati program media (Hall, 2019: hlm. 272-274), dikembangkanlah teori seputar media dan budaya populer. John Fiske percaya bahwa agar sebuah praktik menjadi populer, ia tidak hanya harus memenuhi kebutuhan produser, tetapi juga kebutuhan audiens (Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 91-92). Dalam menikmati program media, khalayak secara aktif terlibat dengan teks media, meng-apropriasi, dan mentransformasikannya sesuai dengan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, dalam hal kuasa di balik produksi media, audiens sesungguhnya tidak kalah dari produser karena mereka juga dapat menentang dan memengaruhi program media agar sesuai dengan keyakinan, nilai, dan ideologi mereka (Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 92-93).

Konsep audiens aktif bahkan lebih relevan saat ini. Sebelum popularitas media sosial, media massalah yang mendominasi industri informasi dan hiburan, serta memegang peranan tertinggi dalam mendistribusikan ideologi tertentu.

Namun, dengan adanya media sosial, semua orang bisa menjadi *encoder* dan *decoder*. Setiap orang dapat menyuarakan pendapat, keyakinan, nilai, dan ideologi mereka, serta bereaksi terhadap keyakinan, nilai, dan ideologi orang lain (Dupont, 2019). Dalam hal ini, maka sesungguhnya media sosial telah berperan dalam mendistribusikan wacana, pengetahuan, ideologi, hingga menjembatani terjadinya relasi kuasa di dunia maya.

Dalam kasus-kasus pemecatan yang melibatkan Rafael, Esha, Hariyanto, dan Sudarman, *flexing* awalnya dilakukan untuk membangun citra sebagai golongan kelas atas dengan harapan bisa mendapatkan privilese dan kuasa yang sering kali diasosiasikan dengan kelas tersebut. Contoh konkret tampak dari bagaimana Rafael dengan bangganya mengeklaim diri sebagai “penguasa Jaksel” ketika memprotes sebuah restoran yang menurutnya memperlakukan sang istri secara kurang baik. Contoh yang lebih serius tampak dari bagaimana Mario tidak menunjukkan rasa takut akan hukum; tidak membayar tol dengan menerobos pintu tol (Nurchahyo & Maullana, 2023; Noviansah, 2023), menyatakan bahwa ia tidak takut bila David meninggal akibat perbuatannya, bahkan menantang saksi mata untuk melaporkan tindakannya kepada polisi (CNN Indonesia, 2023a). Dari dua contoh tersebut, dapat dilihat bahwa status sebagai golongan kelas atas telah memberi kesempatan bagi para pejabat dan keluarga mereka untuk mengartikulasikan kuasa, yang akhirnya menimbulkan bacaan negatif di kalangan warganet seputar *flexing* di kalangan pejabat.

Mengenai bagaimana bacaan tersebut terbentuk, menyebar, dan memengaruhi relasi kuasa dalam kasus-kasus *flexing* yang lain, kita dapat melihat kembali proses *encoding-decoding* oleh audiens aktif dan konsep ISA. Ditinjau dengan model *encoding-decoding*, Rafael Alun dan keluarganya adalah *encoder* yang menyebarkan keyakinan, ideologi, dan nilai-nilai tentang

citra diri mereka dengan mengodekannya ke dalam postingan media sosial mereka yang glamor. *Decoder* dalam kasus ini adalah warganet. Sesuai konsep audiens aktif, warganet memiliki kuasa untuk mengapropriasi, menentang, dan mentransformasikan pesan yang disampaikan agar sesuai dengan keyakinan, nilai, dan ideologi yang ingin mereka sebarkan (Hall, 2019: hlm. 272-274; Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 91-93).

Dalam kasus-kasus ini, warganet mengambil sikap oposisi di mana *decoder* sepenuhnya menolak makna yang dimaksudkan oleh *encoder* karena adanya pertentangan antara keyakinan dari *encoder* dan *decoder* (Hall, 2019: hlm. 274). Ditinjau dari sisi teori identitas sosial, hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kelompok sosial antara para pejabat dan warganet. Sebagai anggota kelompok sosial yang tidak memiliki privilese sebanyak para pejabat, maka warganet sesungguhnya tidak bisa lepas dari *in-group favouritism* (Wetherell & Mohanty, 2010: hlm. 46-48). Dalam proses *decoding* terhadap *flexing* yang dilakukan oleh keluarga Rafael, warganet yang terpengaruh *in-group favouritism* mencari gugatan yang dapat memberatkan golongan pejabat dengan cara mengaitkan berita tentang *flexing* dengan berita tindak pidana yang dilakukan Mario. Hal ini menghasilkan bacaan negatif bahwa *flexing* merupakan bukti bahwa Rafael adalah seorang pejabat arogan yang tidak dapat mendidik anaknya (Ravita, 2023).

Tidak sampai di situ saja, warganet terus mengembangkan spekulasi baru, memaknai kelalaian Rafael dalam mendidik Mario sebagai tanda bahwa ia sendiri kurang bermoral, sehingga kekayaannya sebagai seorang Dirjen Pajak bisa saja berasal dari korupsi pajak rakyat (Ravita, 2023). Warganet kemudian balik melakukan proses *encoding*, menyampaikan bacaan negatif serta keyakinan mereka ke dalam kolom komentar serta unggahan media sosial. Melalui tindakan ini, warganet

mengartikulasikan kuasa mereka terhadap pemerintah hingga akhirnya Rafael dibebastugaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 24 Februari 2023, dan mulai diperiksa KPK pada 1 Maret 2023 (Tjitra, 2023). Langkah ini diambil sebagai bentuk negosiasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat, dengan harapan bisa mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini mendemonstrasikan pendapat Foucault dan Fiske bahwa kuasa ada dalam praktik populer dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kuasa tidak dipraktikkan secara eksklusif oleh kelompok dominan saja, tetapi dapat diartikulasikan oleh siapa pun (May, 2006: hlm. 83-85; Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 91-93).

Dicopotnya Rafael membawa pengaruh besar kepada pejabat-pejabat lain yang kedapatan melakukan *flexing* sesudah Rafael. Pada 20 Maret 2023, Esha Rahmansah Abrar, seorang Kepala Sub-Bagian di Kemensetneg, dinonaktifkan setelah istrinya tampak memamerkan hadiah *anniversary* berupa mobil mewah di akun Instagram-nya (Saptohutomo, 2023). Meskipun hasil pemeriksaan Rafael belum keluar (hingga akhir Maret), sesungguhnya pada saat itu warganet telah mulai merumuskan wacana bahwa *flexing* yang dilakukan pejabat dapat menjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi, seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar 1 Komentar Warganet tentang Esha yang Merujuk Rafael
(Okezone.com, 2023)

Dalam komentar ini, tampak bahwa sumber kekayaan adalah argumen pokok yang digunakan untuk memberatkan

tindakan *flexing* yang dilakukan seorang pejabat. Hal ini didukung dengan adanya bukti dalam situs Sekretariat Negara yang menunjukkan status Esha sebagai ASN golongan IV/a dengan kisaran gaji pokok sekitar tiga hingga lima juta rupiah per bulan (Saptohutomo, 2023). Berbekal informasi ini, warganet kembali memberikan bacaan oposisi dan mengartikulasikan kuasa mereka dengan memviralkan tuduhan korupsi terhadap Esha (Okezone.com, 2023).

Pada hari yang sama ketika Esha dinonaktifkan (20 Maret 2023), S.F. Hariyanto juga menuai kritikan dari warganet akibat unggahan istrinya yang memamerkan berbagai tas bermerek (Ni'am & Santosa, 2023) serta video anaknya yang mengadakan ulang tahun mewah (CNN Indonesia, 2023b). Hal ini cukup ironis mengingat lima hari sebelum ia viral (15 Maret 2023), Hariyanto selaku Sekda Riau sempat memberikan pidato imbauan kepada ASN Riau dan keluarga mereka untuk tidak melakukan *flexing* di media sosial (Tanjung & Susanti, 2023). Hariyanto kemudian membela diri dengan mengeklaim bahwa barang-barang yang digunakan sang istri adalah barang KW, dan pesta ulang tahun sang anak bukan di hotel mewah, melainkan di sebuah toko yang kebetulan juga bernama Ritz Carlton (CNN Indonesia, 2023b). Hal ini sontak memicu reaksi negatif dari warganet yang menganggap Hariyanto meremehkan kecerdasan rakyat Indonesia dengan alasannya (Gambar 2 dan 3, Kumparan.com, 2023).



Gambar 2 dan 3 Bacaan Negatif Warganet terhadap Pembelaan Hariyanto
(Kumparan, 2023b)

Dalam komentar di Gambar 2, tampak bagaimana kata “netizen” sesungguhnya digunakan untuk merujuk sebuah kelompok sosial di mana Hariyanto tidak termasuk di dalamnya, mengimplikasikan adanya konsep *in-group* dan *out-group* dalam benak masyarakat. Warganet kemudian mendemonstrasikan *in-group favouritism* dengan memaknai apa pun alasan Hariyanto secara negatif. Argumen bahwa Hariyanto tengah berbohong untuk menutupi sesuatu juga menunjukkan bahwa bacaan negatif tentang Rafael serta wacana tentang *flexing* dan korupsi, telah memengaruhi warganet untuk membaca pembelaan diri Hariyanto secara oposisi.

Argumen menarik lainnya dapat dilihat dari bagaimana seorang warganet secara spesifik memaknai alasan Hariyanto dalam konteks kelompok sosialnya. Hal ini dapat dicermati lebih jauh dalam komentar panjang lebar seputar kelas para pejabat dalam gambar di bawah ini (Gambar 4).

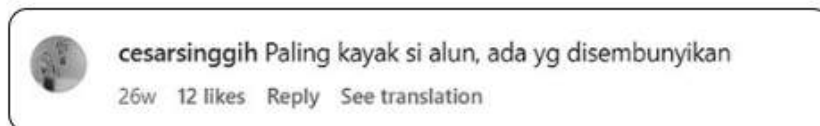


Gambar 4 Pendapat Warganet tentang Kelompok Sosial Hariyanto dan Adrias
 (Kumparan, 2023b)

Munculnya argumen ini menarik mengingat penjenamaan diri para pejabat yang awalnya dilakukan untuk membentuk identitas sosial yang positif, ketika disandingkan dengan wacana yang ada, akhirnya justru dibaca secara negatif oleh

warganet. Fakta ini membuktikan pendapat Foucault bahwa wacana, kuasa, dan pengetahuan saling berkesinambungan (May, 2006: hlm. 92). Menariknya lagi, warganet juga mampu mengapropriasi konten yang disajikan Hariyanto, menggunakan kelas sosial sang pejabat untuk memperkuat argumen dan artikulasi kuasa mereka sendiri terkait tuduhan tindak pidana korupsi. Apa yang dilakukan warganet ini membuktikan pandangan Foucault dan Fiske tentang kuasa yang bisa diartikulasikan oleh audiens dalam konsumsi media populer (May, 2006: hlm. 83–85; Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 91–93).

Menyusul Hariyanto dua hari kemudian (22 Maret 2023), Sudarman Harjasaputra, Kepala BPM Jaktim resmi dipecat setelah sempat diperiksa KPK. Alasan pemecatan tidak lain adalah karena istri Sudarman, Vidya Piscarista, terbukti melakukan *flexing* dengan memamerkan barang mewah serta banyak foto liburan ke luar negeri dalam akun Instagram yang telah dihapusnya (Dirgantara & Meiliana, 2023). Dalam Gambar 4 dan 5, tampak bagaimana warganet menunjukkan kontinuitas dalam memaknai kasus pejabat *flexing* dengan memberikan bacaan negatif terhadap Sudarman dan Vidya.



Gambar 4 Komentar Warganet terhadap Sudarman yang Merujuk Kasus Rafael
(Kumparan, 2023a)



Gambar 5 Komentar Warganet terhadap Vidya yang Merujuk Kasus Hariyanto
(Berita Satu, 2023)

Setelah berita tentang Rafael, Esha, dan Hariyanto, wacana tentang *flexing* pejabat sebagai indikasi korupsi sudah makin kuat. Hal ini tampak dari komentar yang memaknai Sudarman sebagai seorang koruptor seperti Alun (Gambar 4), serta komentar menyindir yang mengimplikasikan bahwa tindakan apa pun yang dilakukan Sudarman dan Vidya untuk mengklarifikasi harta mereka akan dimaknai sebagai usaha mencuci tangan seperti Hariyanto (Gambar 5). Menariknya lagi, warganet tetap teguh memberi bacaan negatif terhadap Sudarman dan Vidya, bahkan ketika muncul pembelaan dari pihak ketiga bahwa kekayaan Vidya berasal dari profesinya sebagai model serta profesi almarhum ayahnya sebagai seorang pilot pesawat Hercules TNI AU (Saputra, 2023).

Ketika komentar-komentar tentang kasus *flexing* yang baru selalu dikaitkan dengan yang sebelumnya, banyaknya jumlah kasus *flexing* di kalangan pejabat jadi terkesan makin banyak dan terus bertambah. Pernyataan bahwa gaya hidup Vidya tidak terkait dengan jabatan Sudarman pada akhirnya tidak dapat mengubah keputusan pemerintah untuk memecat Sudarman, karena hal ini menunjukkan bawah artikulasi kuasa dari rakyat membuat pemerintah kian lama kian terdesak untuk menunjukkan ketegasan dalam penanganan terhadap kasus *flexing* pejabat. Kedua contoh ini kembali membuktikan bahwa warganet aktif melakukan proses *decoding-encoding* yang menguntungkan mereka serta membentuk wacana yang mendukung artikulasi kuasa mereka terhadap pemerintah; sesuai dengan konsep Hall, Fiske, dan Foucault (Hall, 2019: hlm. 272-274; Fiske, 1987, dikutip dalam Oswell, 2006: hlm. 91-93; May, 2006: hlm. 83-85).

Penutup

Tulisan ini telah membahas bagaimana peran media sosial dalam kehidupan sosial kita telah mendorong orang untuk membangun identitas *online* mereka melalui penjenamaan diri. Terkadang, hal ini melibatkan *flexing*, yang merupakan tindakan memamerkan kekayaan seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta meningkatkan status sosial. Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, Esha Rahmansah, S.F. Hariyanto, dan Sudarman Harjasaputra, mereka mempraktikkan *flexing* agar tampak seperti golongan kelas atas, tampak beda dibanding golongan kelas menengah, dan meningkatkan kuasa mereka dalam masyarakat.

Dengan membangun identitas sosial mereka sebagai anggota kelas atas, mereka mengklaim kekuasaan dan hak istimewa yang menyertainya. Namun, ketika dihadapkan pada wacana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Mario Dandy dan Rafael Alun, warganet dengan cepat memaknai aksi *flexing* secara negatif. Dengan menggabungkan wacana penyalahgunaan kekuasaan Rafael Alun dan pengetahuan hukum akan korupsi sebagai tindak pidana, warganet mengartikulasikan perlawanan mereka terhadap *flexing* dan penjenamaan diri yang dilakukan oleh para pejabat. Seiring dengan makin viralnya berita tentang para pejabat yang tidak bermoral, pemerintah makin tertekan oleh kritik dari lebih banyak warga.

Pada akhirnya, para pejabat ini diberhentikan dan dilucuti dari kekuasaan yang berasal dari status serta penjenamaan diri mereka. Kasus-kasus *flexing* ini menunjukkan bagaimana penjenamaan diri dapat menjadi suatu bentuk artikulasi kuasa. Tindakan warganet, di sisi lain, menjadi contoh bagaimana audiens aktif dalam mengolah pengetahuan dan wacana untuk melakukan resistensi. Fenomena ini sesuai dengan pemahaman Foucault bahwa kuasa dapat diartikulasikan oleh siapa saja,

kuasa ada di dalam dan dapat diartikulasikan melalui praktik budaya populer, relasi kuasa dapat mengarah pada hasil yang berada di luar kendali subjeknya, dan artikulasi kuasa akan selalu diikuti oleh resistensi (May, 2006: hlm. 83–85).

Daftar Pustaka

- Berita Satu [@beritasatu]. (2023, Maret 21). Kepala BPN Jaktim mendatangi KPK [Foto]. *Instagram*. <https://www.instagram.com/p/CqClObfMGJJ/>
- CNN Indonesia. (2023a, Maret 2). Polisi ungkap ucapan Mario ke David: Gue gak takut anak orang mati. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302202916-12-920090/polisi-ungkap-ucapan-mario-ke-david-gue-gak-takut-anak-orang-mati>
- CNN Indonesia. (2023b, Maret 26). Sekda Riau soal ultah mewah anak: Hanya di toko namanya Ritz Carlton. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230326100715-20-929400/sekda-riau-soal-ultah-mewah-anak-hanya-di-toko-namanya-ritz-carlton>
- Dupont, T. (2020) Authentic subcultural identities and social media: American skateboarders and Instagram. *Deviant Behavior*, 41(5): 649–664. <https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1585413>
- Dirgantara, A., & Meiliana, D. (2023, Maret 22). Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra dicopot imbas “flexing” harta kekayaan. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/22/11301621/kepala-bpn-jaktim-sudarman-harjasaputra-dicopot-imbas-flexing-harta-kekayaan>
- Hall, S. (2019). *Essential Essays, volume 1: Foundations of cultural studies*. Duke University Press.
- Kenshanahan, A., Febrian, A.R., Saputra, E.H., Latif, A., Kusumadewi, A. (2023, Mei 1). Alasan pejabat flexing dan kenapa mereka dirujuk di medsos. *Kumparan*. <https://>

kumparan.com/kumparannews/alasan-pejabat-flexing-dan-kenapa-mereka-dirujuk-di-medsos-20Jn5whp7nP/full

- Kumparan [@kumparancom]. (2023a, Maret 12). Kepala BPN Jaktim viral karena gaya hidup mewah istri: Hartanya capai Rp 14,7 M [Foto]. *Instagram*. <https://www.instagram.com/p/CpreniktzEc/>
- Kumparan [@kumparancom]. (2023b, Maret 26). Sekda Riau: Kalau istri saya yang pakai barang palsu, pasti orang percaya itu asli [Foto]. *Instagram*. <https://www.instagram.com/p/CqPBa7NtePX/>
- Maulana, H. & Kurniati, P. (2023, Maret 22). Marak keluarga pejabat pamer kekayaan, wagub kepri minta ASN tak hedon. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2023/03/22/163307978/marak-keluarga-pejabat-pamer-kekayaan-wagub-kepri-minta-asn-tak-hedon>
- May, T. (2014). *The Philosophy of Foucault*. Taylor & Francis.
- Ni'am, S. & Santosa, B. (2023, April 6). Sekda Riau S.F. Hariyanto datang ke KPK untuk klarifikasi LHKPN. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/06/10554301/sekda-riau-sf-hariyanto-datangi-kpk-untuk-klarifikasi-lhkpn>
- Noviansah, W. (2023, Maret 1). Pihak Mario Dandy balas tuduhan tak pernah bayar tol: Urusannya apa? *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-6594936/pihak-mario-dandy-balas-tuduhan-tak-pernah-bayar-tol-urusannya-apa>
- Nugroho, I.R. (2022). *Grow Your Personal Branding: Teknik terkini membangun merek diri, Bagaimana membangun merk diri dengan mudah dan murah*. Anak Hebat Indonesia.
- Nurchayyo, D., & Maullana, I. (2023, Agustus 2). Mario Dandy tak bayar tol di hari penganiayaan D, pepet mobil lain supaya gratis. *Kompas*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/02/07141691/mario-dandy-tak->

bayar-tol-di-hari-penganiayaan-d-pepet-mobil-lain-supaya

- Okezone [@okezonecom]. (2023, Maret 20). Istri flexing, pejabat Kemensetneg bakal diperiksa PPATK [Foto]. *Instagram*. https://www.instagram.com/p/Cp_RxYUrE1p/
- Oswell, D. (2006). *Culture and Society: An introduction to cultural studies*. SAGE Publications.
- Pakpahan, R., & Yoesgiantoro, D. (2023). Analysis of the influence of flexing in social media on community life. *JISICOM: Journal of Information System, Informatics and Computing*, 7(1): 173–178. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v7i1.1093>
- Paltridge, B. (2012). *Discourse Analysis*, 2nd Edition. Bloomsbury.
- Prabawanti, M.A.H. (2023, Februari 25). Kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo, ini kronologi lengkap dan motifnya. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1695542/kasus-penganiayaan-oleh-mario-dandy-satriyo-ini-kronologi-lengkap-dan-motifnya>
- Purkiss, J., Royston-Lee, D. (2013). *Brand You: Turn your unique talents into a winning formula*. Pearson Education Limited.
- Ravita, R. (2023, Mei 29). Viral! Video arogan Rafael Alun Trisambodo ngaku penguasa Jakarta Selatan. *TV One*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/125883-viral-video-arogan-rafael-alun-trisambodo-ngaku-penguasa-jakarta-selatan>
- Saptohutomo, A.P. (2023, Maret 20). Profil pejabat Kemensetneg Esha Rahmansah, nonaktif usai istri pamer harta. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/12533851/profil-pejabat-kemensetneg-esha-rahmansah-nonaktif-usai-istri-pamer-harta>
- Saputra, A. (2023, Maret 13). Vidya Piscarista mantan model yang juga istri kepala BPN Jaktim disorot netizen karena pamer kemewahan, ternyata sudah mandiri sejak

remaja. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5231807/vidya-piscarista-mantan-model-yang-juga-istri-kepala-bpn-jaktim-disorot-netizen-karena-pamer-kemewawan-ternyata-sudah-mandiri-sejak-remaja>

Sinaga, S.N. (2023, April 6). Infografis rompi oranye Rafael Alun Trisambodo dan misi KPK bikin miskin. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5252469/infografis-rompi-oranye-rafael-alun-trisambodo-dan-misi-kpk-bikin-miskin>

Statista. (2022, Agustus 22). *Global daily social media usage 2022* [Graphs]. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/>

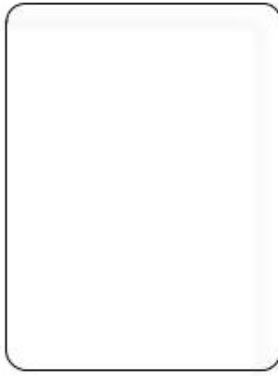
Tanjung, I. & Susanti, R. (2023, Maret 20). Sebelum foto istrinya pamer barang mewah viral, Sekda Riau ingatkan ASN tidak hedon. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2023/03/20/132015178/sebelum-foto-istrinya-pamer-barang-mewah-viral-sekda-riau-ingatkan-asn>

Tjitra, A.T. (2023, Maret 31). Kronologi lengkap kasus Rafael Alun: Dari kasus penganiayaan hingga jadi tersangka KPK. *Tempo*. <https://metro.tempo.co/read/1709497/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaan-hingga-jadi-tersangka-kpk>

Wetherell, M., & Mohanty, C.T., (Eds). (2010). *The SAGE handbook of identity*. SAGE Publications.

Saputra, E.H., Kenshanahan, A., Latif, A., Febrian, A.R., Kusumadew, A. (2023, Mei 1). Gelombang pamer harta pejabat negara. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/gelombang-pamer-harta-pejabat-negara-20Jnfl3UOXa/full>

Wood, M.A., Bukowski, W.M., & Lis, E. (2016). The digital self: How social media serves as a setting that shapes youth's emotional experiences. *Adolescent Research Review*, 1, 163–173. <https://doi.org/10.1007/s40894-015-0014-8>



LIEM SATYA LIMANTA menyelesaikan S01 di Jurusan Sastra Inggris Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, pada tahun 1995. Satya menyelesaikan studi tingkat Master di universitas Leiden, Belanda pada tahun 2002 di bidang *Modern English Literature*. Satya mendapatkan beasiswa dari pemerintah dengan program BPPDN pada tahun 2014 untuk kuliah program doktoral. Gelar doktoral diraihinya dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Ilmu Susastra, Universitas Indonesia pada tahun 2019. Sejak tahun 1997 sampai sekarang aktif sebagai **staf pengajar pada Prodi Sastra Inggris Universitas Kristen Petra, Surabaya**. Sekarang dipercaya sebagai Kaprodi Magister Sastra, UK Petra. Objek kajian yang digelutinya adalah sastra dan film dengan pendekatan *Cultural Studies* dan psikoanalisis. Beberapa tulisan yang telah diterbitkan antara lain: "The Dynamic Interplay Between Agent and Structure in the Film 'the Shawshank Redemption'" (2015), "Haruki Murakami's Deconstructive Reading of the Myth of Johnnie Walker and Colonel Sanders in 'Kafka on the Shore'" (2012, ditulis bersama Djakaria, J.D.), "T.S. Eliot's Misreading of Some Mythological Sources in the Waste Land" (2009). Selain menulis berbagai artikel jurnal tentang puisi dan film, Satya juga menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi bersama Ribus Basuki dan Dwi Setiawan dengan judul *Tiga Tak Tahu Diri* (2015). Buku terakhir yang diterbitkan adalah "Perempuan dan Nasionalisme dalam Film-film Perbatasan Indonesia" (2021).

Book Similarity Check Identitas dan Budaya

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unikastpaulus.ac.id

Internet Source

2%

2

biblio.ugent.be

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%